

TERBIT SETIAP BULAN

EDISI MARET 2022

Menyambut IKN Nusantara :

Superhub

Transformasi Menuju Indonesia Maju



**PUSAT PENELITIAN, PROMOSI DAN KERJA SAMA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
2022**

Sobat Warta pasti tidak asing dengan wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan IKN ini memiliki tujuan besar untuk memastikan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 bisa tercapai.

Kontribusi daerah timur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia baru mencapai sekitar 15 persen. Selain itu, sekitar 85 persen jumlah penduduk juga masih terpusat di daerah Jawa dan Sumatra. Sebagai superhub, IKN akan memiliki enam kluster ekonomi, meliputi Industri Teknologi Bersih, Farmasi Terintegrasi, Industri Pertanian Berkelanjutan, Ekowisata dan Wisata Kesehatan, Bahan Kimia dan Produk Turunan Kimia, serta Energi Rendah Karbon. Selain itu, ada pula dua kluster pendukung, yakni Pendidikan Abad ke-21 dan Smart City dan Pusat Industri 4.0. (Bappenas.go.id)

Jadi, pemindahan IKN ini bukan sekadar mindahin ibu kota, tapi ada tujuan besar dibaliknya yaitu agar pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih merata dari Sabang sampai Merauke, Sob!

Badan Informasi Geospasial (BIG) tentu saja turut berperan dalam mewujudkan IKN yang digadang-gadang mengusung konsep "Smart Forest City" alias kota pintar dengan tema hutan. BIG bersama Kementerian PUPR melaksanakan survei jaring kontrol geodesi (JKG) di wilayah bakal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Penasaran?
Simak cerita lengkapnya di artikel.

Tim Redaksi e-Warta Geospasial

Pengarah : Muhtadi Ganda Sutrisna
Penanggung Jawab : Suprajaka
Redaktur : Mone Iye Cornelia Marschiavelli
Editor : Luciana Retno Prastiwi, Kesturi Haryunani P
Desain : Muhammad Afif
Juru foto : Risa Krisadhi, Ivan Setiawan
Sekretariat : Ratih Destarina
Pembuat artikel :
Achmad Faisal Nurghani, Adhy Rahadhyan, Maya Scoryna P, Tommy Nautico, Agung Teguh Mandira, Bramanto Apriandi, Maryanto, Suranto, Farrah Leovita P.

Sekretariat e-Warta Geospasial

Kelompok Kerja Humas dan Kerja Sama Badan Informasi Geospasial
Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46 Cibinong Jawa Barat 16911
Email : wartageospasial.big@gmail.com

BIG-Kementerian PUPR Kolaborasi Survei JKG di IKN

Kontributor :
Kesturi Haryunani Pendari/Ahmad Faisal Nurghani

Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG) melaksanakan survei jaring kontrol geodesi (JKG) di wilayah bakal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Survei yang dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 21-31 Maret 2021 ini bertujuan mendapatkan nilai acuan atau referensi untuk pemetaan dan pembangunan wilayah IKN.

“Nilai koordinat geodetik dan gaya berat dari pilar JKG ini akan menjadi acuan untuk semua pemetaan yang dilakukan,” jelas Raa Ina Sidrotul Munthaha, surveyor pemetaan (surta) dari PJKGG.



Menurut Raa Ina, tim BIG melakukan pengukuran Global Navigation Satellite System (GNSS), sifat datar teliti dari benchmark pasang surut (BM pasut) sementara menuju Titik OIKN, serta pengukuran gaya berat di setiap titik referensi geospasial wilayah IKN. Pengukuran tersebut dilakukan di lima pilar titik JKG, yaitu OIKN, 1IKN, 2IKN, 3IKN, dan 4IKN. Sedangkan, BM pasut berada di titik OIHM.

Khusus untuk pilar OIKN, 1IKN, dan 2IKN BIG membangun pilar pendamping sebagai cadangan sekaligus backsight penetapan nilai azimuth untuk keperluan engineering saat pembangunan berlangsung. “Seluruh pilar JKG ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk umum, tidak hanya wilayah

IKN saja,” ujar Raa Ina.

Pengukuran nilai GNSS dilakukan secara bergantian selama 36 jam untuk masing-masing pilar. Selanjutnya, pengukuran sifat dasar teliti dilakukan dari OIHM menuju OIKM yang berjarak sekitar 9,5 kilometer.

“Pengukuran gaya berat kami lakukan di sepanjang jalur sifat datar OIHM ke OIKM di setiap titik jaring kontrol geodesinya sebagai acuan dalam pemetaan atau pengukuran di sekitar wilayah IKN,” terangnya.

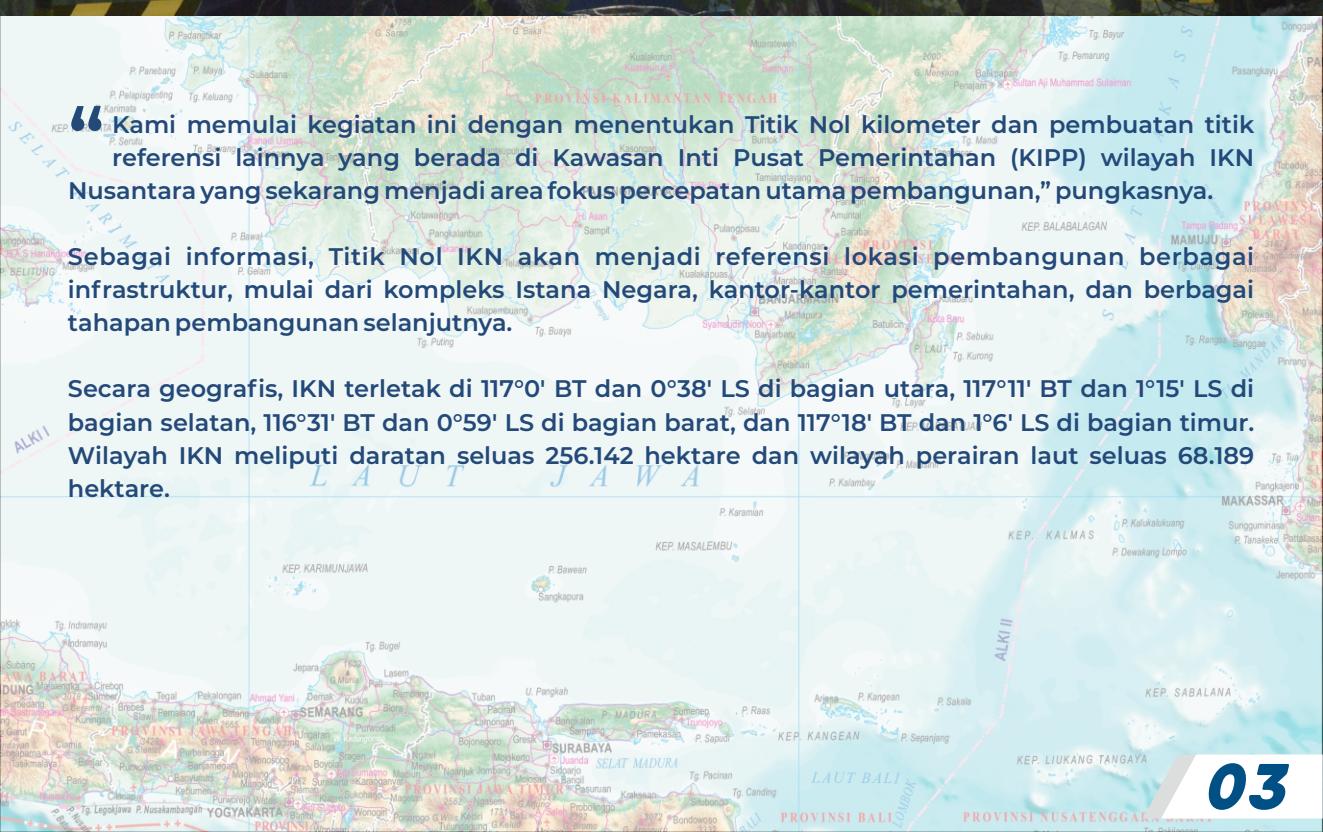
Gama Ilmi Hartanto dari Bidang Data dan Teknologi Informasi Kementerian PUPR mengatakan, pihaknya berkolaborasi dengan BIG untuk pengukuran Cross-Origin Resource Sharing (CORS) dan titik kontrol lainnya sebagai referensi pembangunan di IKN. Hasil pengukuran ini akan menjadi standar untuk pembangunan dan perluasan kawasan IKN.



“Kami memulai kegiatan ini dengan menentukan Titik Nol kilometer dan pembuatan titik referensi lainnya yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah IKN Nusantara yang sekarang menjadi area fokus percepatan utama pembangunan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Titik Nol IKN akan menjadi referensi lokasi pembangunan berbagai infrastruktur, mulai dari kompleks Istana Negara, kantor-kantor pemerintahan, dan berbagai tahapan pembangunan selanjutnya.

Secara geografis, IKN terletak di $117^{\circ}0' BT$ dan $0^{\circ}38' LS$ di bagian utara, $117^{\circ}11' BT$ dan $1^{\circ}15' LS$ di bagian selatan, $116^{\circ}31' BT$ dan $0^{\circ}59' LS$ di bagian barat, dan $117^{\circ}18' BT$ dan $1^{\circ}6' LS$ di bagian timur. Wilayah IKN meliputi daratan seluas 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas 68.189 hektare.





Secara geografis, IKN terletak di $117^{\circ}0' BT$ dan $0^{\circ}38' LS$ di bagian utara, $117^{\circ}11' BT$ dan $1^{\circ}15' LS$ di bagian selatan, $116^{\circ}31' BT$ dan $0^{\circ}59' LS$ di bagian barat, dan $117^{\circ}18' BT$ dan $1^{\circ}6' LS$ di bagian timur.

Wilayah IKN meliputi daratan seluas 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas 68.189 hektare.



Transformasi Menuju Indonesia Maju, Menteri PUPR : Pembangunan IKN Usung Konsep Future Smart Forest City

Sumber : <https://pu.go.id/berita/transformasi-menuju-indonesia-maju-menteri-pupr-pembangunan-ikn-usung-konsep-future-smart-forest-city>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi representasi bangsa yang unggul dengan mewujudkan smart city (kota pintar), kota modern berkelanjutan, serta memiliki standar internasional sehingga menjadi contoh bagi pembangunan kota-kota lain di Indonesia.

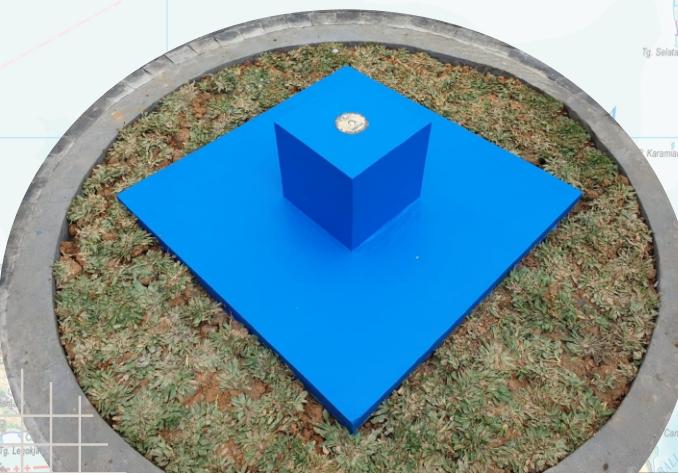
"Pemindahan IKN bukan sekedar memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membangun gedung-gedung pemerintahan saja, tetapi juga menjadi lompatan untuk transformasi bangsa menuju Indonesia Maju," ujarnya pada acara Beranda Nusantara pada Rabu (23/2/2022) di Kantor RRI Jakarta.

Turut hadir sebagai narasumber pada acara tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Plt Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan HAM Roberia, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irawan, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprahadi Prawiradinata, dan Designer Istana Negara IKN Nyoman Nuarta.

Menurut Presiden Jokowi, IKN Nusantara nantinya akan memiliki 70% area hijau, 80% transportasi publik, dan

pengurangan suhu 2 derajat. Jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lainnya di komplek IKN diprediksi hanya membutuhkan waktu 10 menit. Sehingga IKN akan menjadi kota inklusif, terbuka, dan ramah bagi seluruh kalangan masyarakat untuk hidup berdampingan.

Menteri Basuki menjelaskan IKN akan dibangun secara bertahap hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap awal tahun 2022-2024, pembangunan yang akan mulai dikerjakan Kementerian PUPR tahun ini adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar.



“KIPP terbagi dalam 3

Klaster yaitu pemerintahan inti, pemerintahan pendidikan, dan pemerintahan kesehatan. Area yang akan dibangun hanya 24,5% (1.633 Ha) dari seluruh KIPP (6.671 Ha), selebihnya 75,5% (5.038 Ha) akan dimanfaatkan sebagai area hijau,” kata Menteri Basuki.

Infrastruktur prioritas yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR antara lain Istana Kepresidenan, Masjid Negara, perkantoran Kementerian/Lembaga, penataan Kawasan Sumbu Kebangsaan dan Tripraja, hunian ASN, jalan akses dan jalan lingkungan tahap awal, serta infrastruktur dasar permukiman seperti penyediaan air baku melalui

Bendungan Sepaku Semoi dan beberapa bendungan lainnya. Sebelum pembangunan infrastruktur dasar, pembangunan IKN akan diawali oleh upaya revitalisasi dan reboisasi hutan terlebih dahulu.

BRUNEI DARUSSALAM
BANDAR SERI BEGAWAN
“Kami sekarang sedang merevitalisasi hutan di kawasan IKN. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan Dirjen Kehutanan sedang dilapangan untuk mempercepat nursery (pembibitan pohon),” ucap Menteri Basuki.

Dengan telah disahkannya UU IKN, Menteri Basuki berharap seluruh masyarakat dapat memberikan dukungan agar Kementerian PUPR beserta stakeholder lainnya dapat

membangun IKN dengan baik sesuai dengan 3 pilar visi IKN yaitu mencerminkan identitas nasional, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mewujudkan kota cerdas, modern, dan berstandar internasional.

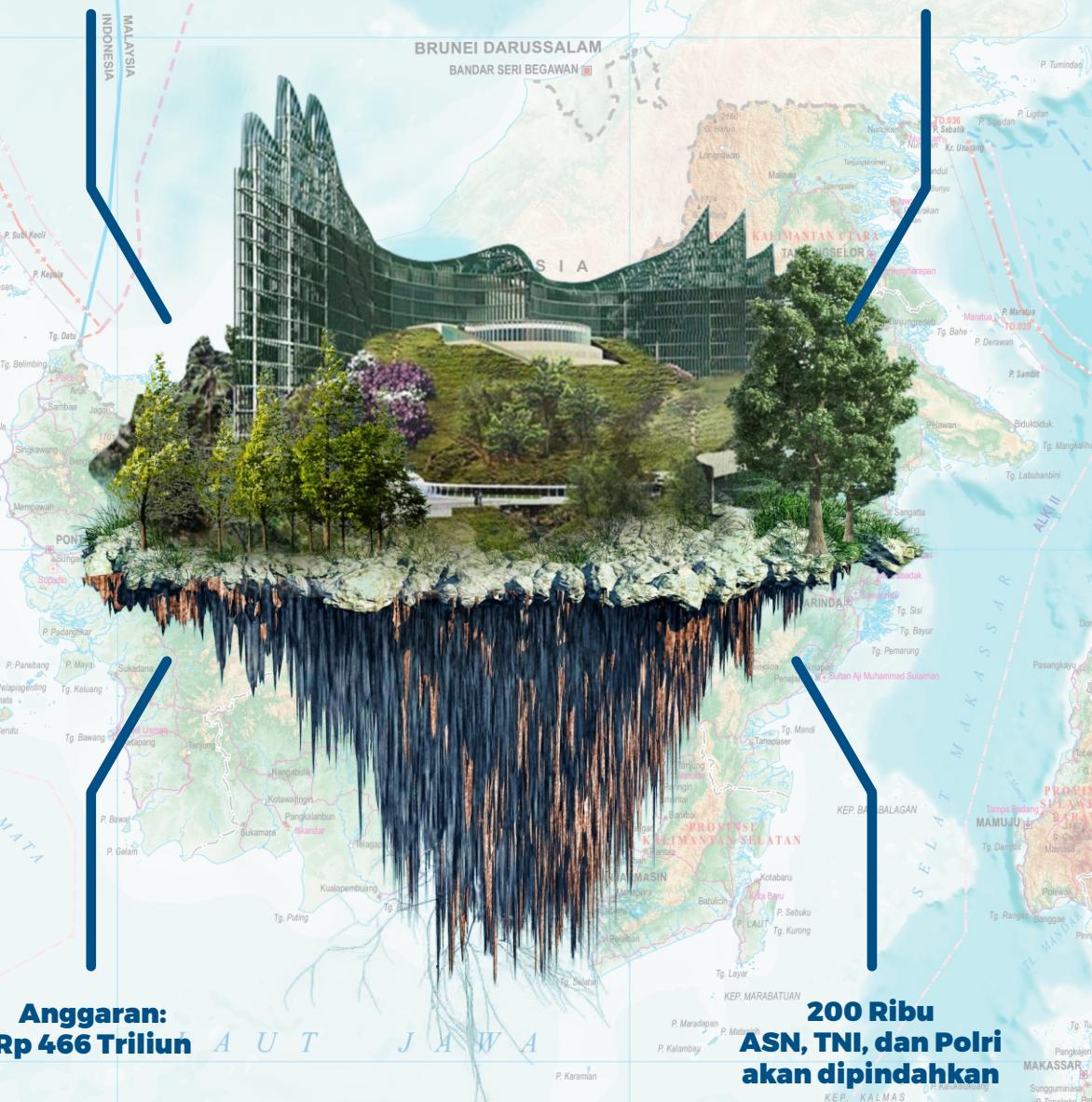
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi, dan Arsitek Perancang Desain IKN Sibarani Sofian.



Ibu Kota Baru RI Bernama Nusantara

**Luas Lahan : 256,142 HA
(3x luas Jakarta)**

**Kab. Penanjam Paser Utara
dan Kab. Kutai Kartanegara**



**Anggaran:
Rp 466 Triliun**

**200 Ribu
ASN, TNI, dan Polri
akan dipindahkan**

**Target pemindahan
Ibu Kota
Semester I 2024**

**Dipimpin kepala otorita (setingkat menteri)
yang ditunjuk presiden dengan masa
jabatan 5 tahun**